

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Buoyancy PNBP Sektor Perikanan Subsektor SDA

Analysis of Factors Affecting Buoyancy of PNBP in the Fisheries Sector of Natural Resources Subsector

*Nur Alifah Rahmawati dan Evi Yulia Purwanti

Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 17 Januari 2023
Perbaikan naskah: 25 Desember 2024
Disetujui terbit : 12 Maret 2024

Korespondensi penulis:
Email: nuralifah2507@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v19i1.12220>



ABSTRAK

Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dengan sumber daya perikanan melimpah yang dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya dari penerimaan bukan pajak subsektor sumber daya alam (SDA). Dengan daya apung PNBP, responsivitas PNBP sektor perikanan subsektor SDA terhadap perubahan PDB dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi daya apung PNBP sektor perikanan subsektor SDA pada tahun 2002—2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPS dengan metode analisis regresi *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka pendek, nilai produksi perikanan dan reformasi PNBP sektor perikanan berpengaruh positif dan signifikan, *illegal fishing* berpengaruh negatif dan signifikan. Akan tetapi realisasi belanja KKP tidak berpengaruh signifikan terhadap daya apung PNBP sektor perikanan subsektor SDA. Dalam jangka panjang nilai produksi perikanan, realisasi belanja KKP, *illegal fishing*, dan reformasi PNBP sektor perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap daya apung PNBP sektor perikanan subsektor SDA. Sebagai rekomendasi, perlu adanya kebijakan yang terukur dan konsisten dilakukan dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan SDA perikanan sebagai sumber penerimaan negara.

Kata Kunci: PNBP perikanan; buoyancy PNBP; reformasi PNBP; nilai produksi perikanan; *illegal fishing*; *error correction model*

ABSTRACT

Indonesia has vast territorial waters with abundant fishery resources which can increase state revenues, especially from PNBP of the natural resources. With the buoyancy of PNBP, the responsiveness of PNBP in the fisheries sector of natural resources can be measured against changes in GDP. This research aims to analyze the buoyancy of PNBP in the fisheries sector of natural resources from 2002 – 2021. This research used secondary data obtained from the Ministry of Finance, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and the Central Statistics Agency, using the *Error Correction Model* (ECM) regression analysis method. The results showed that in the short term, the fishery production value and PNBP reform in the fisheries sector have a positive and significant effect, and *illegal fishing* has a negative and significant effect. However, the realization of KKP spending does not have a significant effect on the buoyancy of PNBP in the fisheries sector of the natural resources subsector. In the long term, the fishery production value, the realization of KKP spending, *illegal fishing*, and PNBP reform in the fisheries sector do not significantly affect the buoyancy of PNBP in the fisheries sector of the natural resources subsector. As a recommendation, there needs to be a measurable and consistent policy carried out in supporting the optimization of the use of fishery resources as a source of state revenue.

Keywords: non-tax state revenue of fisheries; non-tax state revenue buoyancy; non-tax state revenue reform; fishery production value; *illegal fishing*; *error correction model*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan wilayah perairan seluas 6,40 juta km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) potensi sumber daya ikan Indonesia sebesar 12,01 juta ton/ tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 8,60 juta ton/ tahun. Bahkan produksi perikanan laut Indonesia menyumbang 8 persen produksi dunia

(FAO, 2020). Walaupun potensi perikanan Indonesia sangat besar, akan tetapi kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 2,41 persen atau sebesar Rp267.966,60 miliar pada tahun 2021. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor perikanan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) bahkan dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2017 capaian realisasi PNBP sektor perikanan dari SDA hanya sebesar 52 persen

dari target, meskipun masih di bawah target namun sampai tahun 2021 menunjukkan kecenderungan realisasi PNBPN yang terus meningkat menjadi 74 persen.

Kinerja penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak dapat diukur melalui elastisitas dan tingkat *buoyancy* (Dudine & Jalles, 2018). Dalam pajak, *buoyancy* atau daya apung dan elastisitas adalah ukuran umum untuk mengestimasi produktivitas penerimaan pajak. Tanpa mengetahui besarnya persentase produktivitas penerimaan pajak, pada dasarnya dapat mendistorsi harapan mengenai kemampuan perekonomian dalam menghasilkan penerimaan pajak yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal. Elastisitas dan daya apung memiliki keunggulan bahwa keduanya dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak ini dapat berasal dari respons otomatis yang dihasilkan ketika aturan, basis pajak, tarif pajak (perubahan diskresi) dianggap konstan atau dari perubahan diskresi. Pertumbuhan penerimaan pajak yang dihasilkan dari efek gabungan baik respons otomatis maupun perubahan diskresioner adalah daya apung (Seydou, 2020). Daya apung sangat penting dan diperlukan khususnya dalam perumusan kebijakan pajak, analisis tersebut memungkinkan otoritas fiskal dalam menjaga mobilisasi pajak serta membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari sistem penerimaan pajak untuk mengarahkan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Kemudian mengetahui faktor struktural yang kemungkinan memengaruhi daya apung pajak juga membantu mengantisipasi bagaimana semua pertimbangan tersebut akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi (Dudine & Jalles, 2018).

Daya apung yang bernilai kurang dari satu mencerminkan inelastisitas sistem penerimaan (Seydou, 2020). Pada tahun 2017—2021 menunjukkan bahwa respons PNBPN sektor perikanan subsektor SDA terhadap PDB berada pada posisi fluktuatif. Tahun 2020 merupakan tingkat *buoyancy* terendah, yakni -6,22 persen, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan nasional menurun. Sementara pada tahun 2017 merupakan tingkat *buoyancy* tertinggi mencapai 5,44 persen.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa rata-rata laju pertumbuhan nilai produksi perikanan tahun 2016—2020 mencapai 7,80 persen. Namun pada kenyataannya kontribusi dari hasil perikanan tersebut belum berpengaruh besar pada penerimaan negara. Jika dibandingkan

antara realisasi PNBPN sektor perikanan subsektor SDA tahun 2020 sebesar 600,66 miliar rupiah dengan nilai produksi perikanan sebesar 363,08 triliun rupiah, maka hanya sebesar 0,16 persen dari total nilai produksi perikanan yang direalisasikan pada APBN. Besarnya nilai produksi perikanan yang diperoleh seharusnya mampu menjadi acuan jumlah PNBPN yang dapat diterima oleh negara. Dinamika PNBPN juga seringkali dikaitkan dengan realisasi belanja sebagai bentuk pengeluaran pemerintah dalam rangka pelaksanaan pungutan PNBPN. Seperti pada penelitian Ghazo dan Abu-Lila (2018) yang menemukan adanya pengaruh positif pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan pajak di Jordania, sesuai dengan teori *the spend-tax hypothesis* yang disampaikan oleh Peacock dan Wiseman (1979) bahwa belanja pemerintah dapat diikuti dengan peningkatan penerimaan negara. Penelitian Parui (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah saat ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Luasnya wilayah perairan dan besarnya potensi sumber daya ikan yang dimiliki Indonesia tidak hanya mendatangkan keuntungan, namun juga menyebabkan rawan terjadinya kegiatan ekonomi ilegal, salah satunya *IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)*. Adanya *IUU Fishing* atau yang sering disebut *illegal fishing* dianggap merugikan kelestarian lingkungan, seperti stok ikan yang akan habis di masa depan. Kondisi ekologis yang buruk tentu saja akan mengurangi keuntungan ekonomi bagi pekerja perikanan seperti nelayan (Asche *et al.*, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak adanya *IUU Fishing* tidak hanya dari segi lingkungan, namun juga dari segi ekonomi, maupun aspek lainnya, termasuk berkurangnya penerimaan negara. Menurut data FAO (2016) bahwa kerugian dunia dari *IUU Fishing* mencapai 11—30 juta ton per tahun dengan taksiran total kerugian berkisar US\$10—23 miliar. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa *illegal fishing* memberi dampak pada kinerja penerimaan negara. Selain itu, adanya reformasi terkait kebijakan PNBPN sektor perikanan juga dinilai memengaruhi kinerja penerimaan. Reformasi PNBPN sektor perikanan yang dilakukan pada tahun 2015 melalui terbitnya PP No. 75 Tahun 2015 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai memberi dampak pada realisasi PNBPN sektor perikanan pada tahun 2016 yang naik sebesar 185 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp553,57 miliar (KKP, 2017). Seperti pada penelitian yang dilakukan Omondi *et al.* (2014) mengenai pajak bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax buoyancy* dan *tax elasticity* di Kenya.

Zulkarnain *et al.* (2013) dalam penelitiannya terkait pengaruh nilai produksi perikanan budi daya terhadap PDB sektor perikanan menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan budi daya secara bersama-sama memengaruhi PDB sektor perikanan Indonesia tahun 2000—2010. Dengan budi daya laut yang memiliki efek paling dominan, kemudian diikuti budi daya kolam dan budi daya tanggul. Ghazo & Abu-Lila (2018) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan dari pajak di Jordania selama periode 1979—2016. Pada penelitian Kurniawan *et al.* (2020) juga menyebutkan bahwa realisasi belanja pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kemudian Anwar (2014) meneliti tentang pentingnya pengelolaan sumber daya ikan dalam menambah penerimaan negara, hasil menunjukkan bahwa adanya *illegal fishing* mengakibatkan penerimaan negara mengalami penurunan yang juga mendorong penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa *illegal fishing* mengurangi pendapatan negara termasuk di dalamnya adalah dari pajak, PNBP, dan jasa dari operasi yang sah. Pada penelitian Iskandar *et al.* (2021) yang menganalisis terkait pengaruh perubahan kebijakan pajak daerah terhadap *buoyancy* pajak daerah menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat *buoyancy* pajak daerah pada periode tahun 2007—2019 di 423 daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Seydou (2020), dalam penelitiannya mengungkapkan jika reformasi perpajakan gagal meningkatkan produktivitas sistem perpajakan. Berdasarkan deskripsi di atas, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel nilai produksi perikanan, realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan, *illegal fishing*, dan reformasi PNBP sektor perikanan terhadap tingkat daya apung atau *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA tahun 2002—2021.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2002—2021 dalam lingkup nasional yang terdiri dari daya apung PNBP sektor perikanan subsektor SDA dalam satuan persen, nilai produksi

perikanan dalam satuan miliar rupiah, realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam satuan miliar rupiah, *illegal fishing* dalam satuan unit kapal, dan reformasi PNBP sektor perikanan tahun 2015, yakni PP Nomor 75 Tahun 2015 sebagai *dummy*. Data diperoleh dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Analisis Data

Metode *Error Corection Model* (ECM)

Metode ECM digunakan karena data *time series* seringkali tidak stasioner. Data yang tidak stasioner akan menyebabkan *spurious regression*, yakni regresi yang memiliki *R-squared* tinggi, namun tidak ada hubungan berarti di antara keduanya (Gujarati & Porter, 2015). Artinya, bahwa metode ECM digunakan agar menghindari adanya regresi lancung atau hasil pendugaan diragukan. Selain itu metode ini juga dapat menganalisis pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Analisis ECM jangka pendek dapat melihat keterkaitan jangka pendek yang merupakan metode yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi di antara variabel-variabelnya. Kemudian terkait periode jangka panjang memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian penuh untuk setiap perubahan yang timbul, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana perubahan pada variabel independen menyesuaikan secara penuh variabel dependen (Putra, 2013). Secara spesifik, terdapat uji lag optimum untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan variabel dependen dalam merespons perubahan variabel lain yang dipengaruhi (Eka *et al.*, 2019).

Uji Stasioneritas

Sebelum dilakukan regresi data *time series* maka perlu dilakukan uji stasioneritas pada seluruh variabel untuk mengetahui apakah variabel stasioner atau tidak. Data dikatakan stasioner apabila data tidak mengandung akar unit yang mana mean, varians, dan kovarians konstan sepanjang *series*. Salah satu konsep mengetahui stasioneritas data adalah dengan uji akar unit. Uji akar unit yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Apabila data tidak stasioner maka dapat dilakukan uji stasioneritas pada tingkat diferensi data atau uji derajat integrasi.

Uji Kointegrasi

Bila variabel runtut waktu saling terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang (Gujarati & Porter, 2015). Pengujian

ini sangat penting apabila model dinamik akan dikembangkan. Dengan demikian, interpretasi tidak akan menyedatkan khususnya dalam analisa jangka panjang. Salah satu uji yang digunakan untuk menentukan kointegrasi sejumlah variabel adalah dengan uji *Engel-Granger* (EG) atau uji *Augmented Engel-Granger* yang artinya pengujian dilakukan dengan memanfaatkan uji *Augmented Dickey-Fuler* dengan cara mengestimasi model regresi kemudian menghitung nilai residualnya.

Analisis Regresi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yakni nilai produksi perikanan (NP), realisasi belanja KKP (RB), *illegal fishing* (IF), dan reformasi PNBP perikanan (R) sebagai variabel *dummy* terhadap variabel dependen, yaitu daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA (NTB). Oleh karena itu model penelitian dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$NTB_t = f (NP_t, RB_t, IF_t, R_t, \mu_t) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan/Remaks:

- NTB = buoyancy PNBP sektor perikanan subsektor SDA/ *buoyancy of PNBP fisheries sector of the natural resources subsector*
- NP = nilai produksi perikanan/ *fishery production value*
- RB = realisasi belanja KKP/ *realization of KKP spending*
- IF = *illegal fishing*
- R = reformasi PNBP perikanan/ *non-tax state revenue reform in the fisheries sector*
- μ = *error term*

Model ECM dalam penelitian ini ialah menggunakan model OLS dengan memasukkan nilai resid (ECT) pada persamaan ECM. Maka model dalam jangka panjang (2) dan jangka pendek (3) ditulis sebagai berikut:

$$NTB_t = \alpha_0 + \alpha_1 NP_t + \alpha_2 RB_t + \alpha_3 IF_t + \alpha_4 R_t + \mu_t \dots\dots(2)$$

$$DNTB_t = \beta_0 + \beta_1 DNP_t + \beta_2 DRB_t + \beta_3 DIF_t + \beta_4 DR_t +$$

$$ECT(-1) + \mu_t \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan/Remaks:

- α = koefisien regresi jangka panjang/ *long-term regression coefficient*
- β = koefisien regresi jangka pendek/ *short-term regression coefficient*
- D = perubahan/ *difference*
- ECT(-1) = *Error Correction Term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan

PNBP KKP terdiri atas penerimaan subsektor sumber daya alam (SDA) dan non sumber daya alam (SDA). PNBP subsektor SDA sendiri terdiri atas Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP).

Tabel 1 menjelaskan terkait target dan realisasi PNBP pada sektor perikanan tahun 2017—2021. Realisasi PNBP sektor perikanan dari subsektor non SDA selalu menunjukkan persentase di atas 100 persen. Berbeda dengan realisasi PNBP sektor perikanan subsektor SDA yang hanya berkisar antara 52—83 persen, dengan kata lain tidak pernah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN. Hal ini menunjukkan kinerja PNBP sektor perikanan subsektor SDA belum optimal.

Tabel 1. Target dan Realisasi PNBP Sektor Perikanan 2017—2021 (Miliar Rupiah).

Jenis PNBP	Keterangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SDA	Target	950,00	600,36	625,14	900,54	957,24
	Realisasi	491,03	448,75	521,94	600,66	708,19
	%	52	75	83	67	74
Non SDA	Target	105,94	107,58	126,57	133,40	152,68
	Realisasi	221,55	286,37	198,78	190,12	243,30
	%	209	266	157	143	159
Total	Target	1.055,94	707,95	751,71	1033,95	1.115,98
	Realisasi	712,58	735,12	720,71	790,78	951,49
	%	67	104	96	76	85

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022.

Tabel 2. Target dan Realisasi PNBP Sektor Perikanan Subsektor SDA Tahun 2002—2021 (dalam Miliar Rupiah).

Tahun	PPP		PHP		Total	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	13,09	11,24	937,04	479,79	950,13	491,03
2018	23,13	6,23	576,88	442,52	600,00	448,75
2019	0,30	6,73	624,84	515,21	625,14	521,94
2020	0,35	10,67	900,00	589,99	900,35	600,66
2021	0,35	33,82	956,84	674,37	957,19	708,19

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Keterangan: n.a = not available.

Tabel 2 menunjukkan data target dan realisasi PPP dan PHP tahun 2002—2021. Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan baik dari PPP maupun PHP rata-rata keseluruhan belum mencapai target pada setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 14 persen dari target yang telah ditentukan, dan realisasi tahun 2015 menjadi realisasi dengan persentase paling rendah sepanjang tahun 2002—2021. Pada tahun tersebut juga pertumbuhan penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga -63,36 persen.

2. Realisasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah anggaran belanja kementerian yang terealisasi pada satu tahun anggaran yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Tabel 3 terlihat bahwa tahun 2002—2021, rata-rata realisasi anggaran belanja KKP tidak terpenuhi 100 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2017, persentase realisasi anggaran belanja hanya 67 persen. Menurut KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017), hal tersebut terjadi di antaranya karena masih banyaknya gagal lelang pada proses pengadaan barang dan jasa serta beberapa alasan lain yang membuat pemenuhan anggaran belum dapat terlaksana.

3. *Illegal Fishing*

Illegal fishing ialah segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang ilegal atau melanggar perundang-undangan yang berlaku. Data jumlah kapal *illegal fishing* dari hasil operasi kapal pengawas perikanan yang ditangkap dari tahun ke tahun sejak 2002 hingga 2021 memberikan gambaran intensitas *illegal fishing* di Indonesia. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 243 kapal. Rata-rata secara keseluruhan sejak tahun 2002—2021, *illegal fishing* didominasi oleh KIA (Kapal Ikan Asing). Kenaikan *illegal fishing* sangat drastis terlihat pada tahun 2015, naik hampir 200 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut KKP gencar menjalankan program kedaulatan, yakni menutup rapat para pelaku pencuri ikan atau *illegal fishing* di perairan Indonesia. Tingginya intensitas *illegal fishing* memengaruhi besarnya PNBP sektor perikanan.

4. Pengaruh Variabel yang Memengaruhi *Buoyancy* PNBP Sektor Perikanan Subsektor SDA

Analisis determinan daya apung/*buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA menggunakan empat variabel independen, yaitu nilai produksi perikanan, realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan, *illegal fishing*, dan reformasi PNBP sektor perikanan. Nilai produksi perikanan merupakan dasar pengenaan perhitungan PNBP sehingga besarnya PNBP sektor perikanan khususnya subsektor SDA bergantung pada tingkat nilai produksi perikanan. Pengeluaran

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016—2020.

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	7.533,66	6.482,38
2017	9.138,17	6.111,44
2018	7.632,53	6.097,37
2019	5.510,79	5.055,15
2020	5.269,87	4.809,86

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021

pemerintah yang diukur dengan realisasi belanja KKP, sesuai dengan teori *spend-tax hypothesis* terdapat hubungan belanja pemerintah terhadap penerimaan ditunjukkan melalui *keynesian cross* bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. *Illegal fishing* berpengaruh pada stok ikan yang bisa ditangkap yang kemudian berpengaruh pada output yang mampu diperoleh oleh pekerja perikanan yang efeknya akan memengaruhi pungutan yang dapat diterima oleh negara. Variabel keempat adalah variabel *dummy* berupa reformasi PNBP sektor perikanan, melalui perubahan atau penyempurnaan peraturan mampu mendatangkan efektivitas dan efisiensi pada penerimaan, sehingga kinerja penerimaan dapat meningkat. Pengujian stasioneritas dilakukan dengan uji akar unit, mulai pada tingkat level, kemudian dilanjutkan orde selanjutnya.

Perbandingan nilai ADF $t_{statistik}$ dengan nilai kritis McKinnon pada signifikansi 1%, 5%, dan 10% menunjukkan bahwa variabel nilai produksi perikanan, realisasi belanja KKP, *illegal fishing*, reformasi PNBP sektor perikanan, dan *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA keseluruhan stasioner pada tingkat *first difference*.

Hasil penentuan lag optimum yang dihitung menggunakan Eviews bahwa lag optimum dalam model ECM ini dengan memperhatikan nilai AIC, SC, maupun HQ yang terkecil adalah 3, artinya memungkinkan masa penyesuaian penuh 3 tahun setelahnya untuk variabel *buoyancy* PNBP merespons perubahan variabel lain yang dipengaruhi. Dalam hal ini jangka pendek terhitung hingga 3 tahun, setelahnya adalah jangka panjang. Selanjutnya untuk hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas residual hasil uji *Augmented Engel-Granger* pada tingkat level adalah 0,004, artinya residual stasioner pada tingkat level sehingga menunjukkan adanya kointegrasi dan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan jangka

panjang dalam model tersebut.

Jangka Pendek

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa secara parsial variabel nilai produksi perikanan dan reformasi PNBP sektor perikanan berpengaruh positif terhadap daya apung atau *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA tahun 2002—2021, sementara *illegal fishing* berpengaruh negatif. Namun realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap daya apung atau *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA tahun 2002—2021. Pada Tabel 5 menunjukkan R^2 sebesar 0,851, artinya 85,1 persen dari variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Kemudian diketahui juga nilai probabilitas $F_{statistik}$ sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%, artinya secara simultan variabel nilai produksi perikanan, realisasi belanja KKP, *illegal fishing*, dan reformasi PNBP sektor perikanan dalam jangka pendek berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA.

Nilai produksi perikanan dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap *buoyancy* dengan koefisien sebesar 13,804, artinya bahwa ketika nilai produksi meningkat sebesar satu persen dalam jangka pendek *ceteris paribus*, maka akan menaikkan daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA sebesar 13,804 persen. Hasil tersebut selaras dengan penelitian Zulkarnain *et al.* (2013) yang menyatakan nilai produksi perikanan budi daya berpengaruh terhadap PDB sektor perikanan tahun 2000—2010. Selaras juga dengan penelitian Gitawati (2018) bahwa nilai produksi perikanan budi daya tambak, kolam, dan minapadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sembilan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Berpengaruhnya nilai produksi perikanan dalam jangka pendek dimungkinkan karena pada tahun

Tabel 4. Hasil Uji Akar Unit.

Variabel	Level I (0)		First Difference I (1)	
	ADF	Prob	ADF	Prob
LnNP	0.574	0.984	-6.853	0.000
LnRB	-2.998	0.053	-5.294	0.001
LnIF	-2.216	0.207	-3.480	0.021
R	-0.587	0.852	-4.243	0.005
NTB (Non-Tax Buoyancy)	-4.970	0.001	-7.242	0.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

Tabel 5. Hasil Estimasi Persamaan Jangka Pendek.

Variabel Dependen : D (NTB)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	-3.660	2.536	-1.444	0.173
D(LnNP)	13.804*	7.122	1.938	0.075
D(LnRB)	2.349	7.823	0.300	0.769
D(LnIF)	-18.061***	4.774	-3.784	0.002
D(R)	37.151***	11.721	3.170	0.007
ECT(-1)	-0.959***	0.274	-3.497	0.004

R-squared : 0.851
Adj R-squared : 0.793
F-statistic : 14.827
Prob(F-statistic) : 0.000

Keterangan: Tingkat Signifikansi
* signifikan pada $\alpha = 10\%$
** signifikan pada $\alpha = 5\%$
*** signifikan pada $\alpha = 1\%$

2021 terjadi pemutakhiran aturan PNBP perikanan yang ditunjukkan dengan pemberlakuan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP perikanan yang menjelaskan bahwa nilai produksi riil menjadi dasar pengenaan PNBP yang dihitung pasca kegiatan produksi atau saat ikan didaratkan. Tidak seperti formula PNBP sebelumnya yang dihitung bukan berdasarkan nilai produksi riil melainkan dipungut sebelum kapal beroperasi. Hal tersebut tentu menyebabkan kinerja PNBP tidak optimal (Samosir *et al.*, 2014), karena banyak pemanfaatan sumber daya ikan yang akhirnya tidak terdeteksi untuk dilakukan pungutan.

Selanjutnya, variabel realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam jangka pendek berdasarkan hasil estimasi bahwa realisasi belanja KKP tidak berpengaruh terhadap daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA. Hal ini dikarenakan terdapat realisasi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan PNBP sektor perikanan subsektor SDA. Wibowo *et al.* (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa belanja pegawai dan belanja modal tidak berdampak signifikan pada PNBP K/L namun belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian PNBP pada K/L. Berdasarkan laporan keuangan KKP tahun 2020, belanja modal didominasi oleh belanja peralatan dan mesin sebesar 74 persen dari total keseluruhan belanja modal. Kemudian belanja peralatan dan mesin pada umumnya di tahun 2020 merupakan pengadaan kendaraan operasional kantor dan pimpinan, pengolah data, dan peralatan kantor lainnya yang tidak bersinggungan langsung pada PNBP. Kemudian pada data kinerja anggaran KKP menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap dan Budi Daya selaku pengelolaan PNBP sektor perikanan subsektor SDA pada tahun 2020 hanya berkisar

80—85 persen, lebih rendah dibanding dengan unit kerja lain. Bahkan pada tahun 2016 juga hanya 40—66 persen (KKP, 2016).

Variabel *illegal fishing* juga berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dengan arah negatif. Dengan koefisien sebesar -18,061 mengartikan bahwa setiap peningkatan *illegal fishing* sebesar satu persen dalam jangka pendek *ceteris paribus*, maka akan menurunkan daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA sebesar 18,061 persen. Selaras dengan penelitian Anwar (2014) menjelaskan bahwa perikanan ilegal atau *illegal fishing* menimbulkan kerugian mencapai US\$4 miliar per tahun bagi negara. *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau yang lebih dikenal *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh armada asing namun juga armada nasional. Salah satu kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh armada nasional seperti pada penelitian Bahi (2020) yang meneliti adanya praktik *markdown* GT kapal atau ketidaksesuaian ukuran kapal dengan ukuran yang sebenarnya di Palabuhanratu, dari jumlah keseluruhan 22 kapal, semua kapal terbukti melakukan *markdown* GT. Hal serupa juga terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan Cirebon, dalam penelitian Supriadi *et al.* (2019) menunjukkan dari 12 kapal jala cumi setelah diukur ulang antara ukuran pada dokumen dengan fisik sesungguhnya terbukti 100% berbeda. Hal tersebut tentu saja dilakukan untuk menghindari kewajiban PNBP, dan tentu saja pelaporan hasil tangkapan akan lebih kecil dari yang sebenarnya (*under reported*). Menurut hasil kajian, laporan hasil pengukuran ulang dan *focus group discussion* yang dilakukan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (dikutip dari Firdaus *et al.*, 2017) bahwa jumlah kapal penangkap ikan yang melakukan *markdown* di Indonesia tahun 2015 dari 10.520 armada berukuran > 20 GT diestimasi

sebanyak 7.679 armada melakukan *markdown* dan sebanyak 2.841 tidak melakukan *markdown*. Hal tersebut menunjukkan bahwa data perikanan masih tergolong lemah. Lemahnya data perikanan tersebut tentu selain memengaruhi kinerja penerimaan negara juga akan berdampak pada biasanya kebijakan yang akan diberlakukan, misalnya ketika pendaratan ikan masih kurang dari jumlah yang ditentukan maka izin penangkapan akan terus dikeluarkan, akibatnya akan terjadi *overfishing*.

Jumlah armada kapal yang dimiliki nasional untuk perikanan laut berdasarkan data KKP pada tahun 2020 adalah 1.161.332 unit dengan jumlah perahu motor tempel sebanyak 503.955, hampir 50 persen dari total keseluruhan, untuk perahu tanpa motor sebanyak 159.417 unit, dan kapal motor sebanyak 497.960 unit dengan dominasi ukuran < 5 GT. Dengan demikian, armada tangkap masih didominasi oleh armada tangkap skala kecil yang hanya mampu beroperasi di sekitar pesisir pantai sehingga daya jangkauan armada nasional untuk menuju ZEE 200 mil sangat rendah. Hal tersebut tentu saja menyebabkan adanya kekosongan armada nasional di perairan ZEE Indonesia yang akhirnya menjadi salah satu pemicu banyaknya armada asing dengan daya jangkauan dan kapasitas yang lebih besar melakukan perikanan ilegal di wilayah tersebut. Pada akhirnya, potensi sumber daya ikan Indonesia di wilayah ZEE 200 mil menjadi tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan nasional yang memiliki izin sah penangkapan ikan, hal tersebut menyebabkan kerugian penerimaan negara karena pelaku perikanan ilegal terlebih armada asing pasti tidak akan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan nasional untuk dilakukan pungutan. Maka dari itu *illegal fishing* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja penerimaan PNBPN. Perlu adanya pengawasan yang lebih masif dan penindakan pada setiap kegiatan perikanan yang bersifat ilegal guna mengamankan sumber daya yang dimiliki sebagai potensi bagi penerimaan negara.

Kemudian variabel reformasi PNBPN sektor perikanan dalam jangka pendek juga berpengaruh signifikan terhadap daya apung/ *buoyancy* PNBPN sektor perikanan subsektor SDA dengan arah pengaruh positif. Koefisien diketahui sebesar 37,151 yang mengartikan bahwa adanya reformasi tersebut mampu meningkatkan daya apung/ *buoyancy* PNBPN sektor perikanan subsektor SDA sebesar 37,151 persen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iskandar *et al.* (2021) bahwa reformasi/ perubahan kebijakan perpajakan daerah berdampak positif terhadap nilai daya apung pajak daerah secara signifikan. Pada penelitian yang

dilakukan Setyoningrum dan Purwanti (2020) juga menyebutkan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand).

Dampak reformasi terhadap kinerja penerimaan salah satunya dibuktikan dari adanya reformasi PNBPN sektor perikanan pada tahun 2015 melalui PP No. 75 Tahun 2015 atas jenis dan tarif PNBPN sektor perikanan yang menunjukkan setelah adanya reformasi tersebut terdapat peningkatan penerimaan bukan pajak sektor perikanan subsektor SDA yang sebelumnya pada tahun 2015 hanya sebesar 79,27 miliar rupiah naik menjadi 362,12 miliar rupiah pada tahun 2016. Kemudian, penerimaan bukan pajak sektor perikanan subsektor SDA pada tahun-tahun berikutnya memiliki kecenderungan meningkat. Hanya khususnya dari tahun 2017 ke tahun 2018 menunjukkan jumlah penerimaan yang menurun dari 491,03 miliar rupiah menjadi 448,75 miliar rupiah. Reformasi yang dilakukan tentu saja tetap perlu dilakukan evaluasi secara konsisten dan diikuti dengan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraannya agar dampak reformasi dapat dirasakan tidak hanya dalam jangka pendek. Penerimaan bukan pajak sektor perikanan subsektor SDA harus meningkat seiring dengan pendapatan nasional. Seluruh sistem pengelolaan PNBPN sektor perikanan juga harus berkembang untuk meningkatkan penerimaan dari waktu ke waktu dan meminimalkan *potential loss* dengan adanya perubahan basis pengenaan pungutan.

Jangka Panjang

Hasil estimasi jangka panjang OLS (*Ordinary Least Square*) menunjukkan bahwa secara parsial, variabel nilai produksi perikanan, realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan, *illegal fishing*, dan reformasi PNBPN sektor perikanan tidak berpengaruh terhadap tingkat daya apung atau *buoyancy* PNBPN sektor perikanan subsektor SDA tahun 2002—2021. Pada Tabel 4 menunjukkan R^2 sebesar 0,193, yang artinya hanya 19,3 persen dari variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Kemudian diketahui juga nilai probabilitas $F_{\text{statistik}}$ sebesar 0,491 lebih besar dari tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%, artinya secara simultan variabel nilai produksi perikanan, realisasi belanja KKP, *illegal fishing*, dan reformasi PNBPN sektor perikanan dalam jangka panjang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu daya apung/ *buoyancy* PNBPN sektor perikanan subsektor SDA.

Variabel Dependen: NTB				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	69.004	53.566	1.288	0.217
LnNP	-3.108	7.257	-0.428	0.675
LnRB	-3.062	7.446	-0.411	0.687
LnIF	-2.493	4.906	-0.508	0.619
R	13.331	9.552	1.396	0.183

R-squared : 0.193
Adj R-squared : -0.023
F-statistic : 0.895
Prob(F-statistic) : 0.491

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Terkait tidak berpengaruhnya variabel nilai produksi perikanan menunjukkan hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan (Samosir *et al.*, 2014) bahwa kenaikan produksi perikanan dari tahun ke tahun tidak berpengaruh pada PNBP perikanan yang masih saja menunjukkan kinerja tidak optimal. Data nilai produksi perikanan pada rentang tahun 2002—2021 menunjukkan bahwa rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Namun, kenaikan nilai produksi tidak diikuti oleh kenaikan penerimaan PNBP SDA sektor perikanan, penerimaan PNBP sektor perikanan subsektor SDA cenderung fluktuatif. Bahkan pada tahun 2015, dengan kenaikan 2,70 persen nilai produksi perikanan, penerimaan PHP dan PPP justru turun hingga 63 persen. Hal ini dapat terjadi karena formula penghitungan PNBP sektor perikanan subsektor SDA, yakni PPP dan PHP hanya berdasarkan jumlah izin yang dikeluarkan oleh KKP untuk kegiatan penangkapan ikan dengan memperhitungkan perkiraan produksi dan ukuran GT kapal. Hal ini terbukti dari pemberlakuan PP No. 142 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan PP No. 19 Tahun 2006 dan PP No. 75 Tahun 2015 yang mengatur terkait jenis dan tarif PNBP yang berlaku di KKP dengan formula penghitungan terakhir pada tahun 2015 untuk PPP berdasarkan jumlah kapal dan ukuran kapal beserta tarif masing-masing alat, sedangkan untuk PHP berdasarkan harga patokan ikan, ukuran kapal, dan produktivitas kapal yang diperoleh dari tangkapan per tahun yang dibagi dengan ukuran GT kapal. PNBP tersebut seluruhnya dikenakan di depan atau sebelum proses produksi dilakukan.

Formula PNBP yang diberlakukan tersebut jelas menunjukkan bahwa pungutan yang ditarik tidak memperhitungkan jumlah riil produksi atau sejumlah SDA yang diambil manfaatnya dari alam. Hal tersebut mengakibatkan banyak pelaku usaha perikanan yang melaporkan perkiraan jumlah

produksi dan ukuran kapal dengan *under value* atau melaporkan perkiraan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya sehingga pungutan yang dikenakan tidak sesuai dengan keadaan riil. Hal tersebut menyebabkan nilai produksi perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja PNBP (*buoyancy*) sektor perikanan subsektor SDA dalam jangka panjang.

Selanjutnya, berkaitan dengan variabel realisasi belanja KKP, seperti halnya pada jangka pendek, tidak berpengaruhnya realisasi belanja KKP pada kinerja PNBP atau daya apung PNBP sektor perikanan subsektor SDA karena terdapat realisasi anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan PNBP sektor perikanan subsektor SDA. Data realisasi belanja yang digunakan dalam penelitian adalah data realisasi belanja secara keseluruhan, baik belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, maupun belanja lainnya. Tentu saja terdapat realisasi belanja yang tidak memiliki dampak langsung pada upaya peningkatan PNBP atau tidak bersinggungan langsung dengan PNBP.

Kemudian variabel *illegal fishing* dalam jangka panjang juga tidak berpengaruh terhadap daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA tahun 2002—2021. Hal ini dimungkinkan terjadi karena data *illegal fishing* yang digunakan adalah data jumlah kapal yang ditangkap bukan data jumlah kerugian ekonomi yang timbul akibat kegiatan *illegal fishing* tersebut. Penangkapan kapal pelaku *illegal fishing* merupakan strategi jangka pendek (Novita & Duadji, 2017).

Pada jangka panjang reformasi PNBP sektor perikanan tidak berpengaruh terhadap daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA tahun 2002—2021. Hal ini terjadi diduga karena dalam waktu jangka panjang ketika para pelaku usaha sudah lebih paham mengenai pengelolaan pungutan tersebut maka hal itu akan memicu perilaku

penghindaran terhadap pungutan oleh para pelaku usaha, terlebih ketika tata kelolanya tidak dilakukan secara optimal dan konsisten, hal tersebut tentu saja menjadikan dampak reformasi PNBP tidak dapat lagi dirasakan. Seperti pada penelitian Herawati dan Marsono (2020) yang menyatakan bahwa reformasi administrasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal itu menandakan bahwa pada akhirnya reformasi tidak lagi efektif dan berdampak pada kinerja penerimaan. Dalam penelitian Omondi *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa reformasi yang berdampak positif pada daya apung pajak belum cukup untuk membantu menghasilkan pendapatan yang memadai, pemerintah harus selalu mengevaluasi strategi implementasi dan melakukan reformasi lebih lanjut agar dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi pendapatan dalam perekonomian.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, variabel nilai produksi perikanan dan reformasi PNBP sektor perikanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA. Kemudian, variabel *illegal fishing* berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Sementara variabel realisasi belanja KKP tidak berpengaruh signifikan. Dalam jangka panjang variabel nilai produksi perikanan, realisasi belanja KKP, *illegal fishing*, dan reformasi PNBP sektor perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap daya apung/ *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA.

Di samping itu, nilai besaran *buoyancy* PNBP sektor perikanan subsektor SDA yang lebih dari satu dalam beberapa tahun pada periode tahun 2002-2021 juga menandakan bahwa PNBP sektor perikanan subsektor SDA mampu menjadi kapasitas penerimaan yang besar pada penerimaan negara, khususnya bagi Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah.

Rekomendasi Kebijakan

Berkaitan dengan nilai produksi perikanan, PNBP sektor perikanan khususnya subsektor SDA perlu dikenakan berdasarkan nilai produksi riil yang didaratkan oleh masing-masing pelaku usaha. Penerapan PP No. 85 Tahun 2021 tentang tarif dan jenis PNBP sektor perikanan yang mengatur terkait pungutan pasca produksi harus mampu diterapkan

secara menyeluruh di wilayah Indonesia agar ukuran sumber daya alam yang diambil dalam proses produksi mampu merepresentasikan pungutan yang akan dikenakan. Aturan tersebut juga harus diimbangi dengan tata kelola yang optimal dan konsisten, serta selalu dilakukan evaluasi dan peninjauan agar tetap optimal dan tidak bertentangan dengan aturan yang lain.

Kemudian terkait dengan realisasi belanja KKP, alokasi dalam merealisasikan anggaran yang berkaitan langsung dengan PNBP juga perlu dioptimalkan lagi atau menjadi prioritas agar mampu menstimulus penerimaan bukan pajak yang akan diterima. Selanjutnya, adanya *illegal fishing* yang merugikan negara juga harus selalu dipantau dan ditindaklanjuti. Mengingat batas wilayah Indonesia yang rawan dengan kegiatan *illegal fishing*, seharusnya operasi pemantauan dan penindakan selalu dilakukan secara konsisten, baik itu dari segi intensitas pengawasan atau penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran perikanan tersebut. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan penambahan armada perikanan yang sah dengan kapasitas yang mampu mencapai wilayah perairan yang lebih jauh dengan muatan yang lebih besar pada wilayah yang banyak diduduki oleh kapal-kapal ilegal, terutama kapal asing.

Berkaitan dengan reformasi PNBP sektor perikanan, perlu adanya evaluasi dan peninjauan yang dilakukan secara konsisten agar reformasi tersebut tidak hanya berpengaruh dalam jangka waktu pendek namun juga dalam jangka panjang serta menghindari adanya efek negatif yang bisa saja muncul ketika reformasi diterapkan. Penerapan reformasi tersebut jika dilakukan secara konsisten dan optimal tentu saja akan berdampak baik pada penerimaan yang akan diterima karena lebih terukur dan berkualitas. Analisis dalam jangka panjang direkomendasikan untuk melihat konsistensi hasil secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memfasilitasi penulis dengan akses data untuk dapat digunakan dalam penelitian.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah: Nur Alifah Rahmawati sebagai kontributor utama dan Evi Yulia Purwanti sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa

telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Menambah Penerimaan Negara (Studi Kasus Di Perairan Natuna Dan Anambas). *Journal of Judicial Review*, XVI(2), 11–23.
- Asche, F., Garlock, T. M., Anderson, J. L., Bush, S. R., Smith, M. D., Anderson, C. M., Chu, J., Garrett, K. A., Lem, A., Lorenzen, K., Oglend, A., Tveteras, S., & Vannuccini, S. (2018). Three pillars of sustainability in fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(44), 11221–11225. <https://doi.org/10.1073/pnas.1807677115>.
- Bahi, M. N. (2020). *Praktik (Markdown) Gross Tonnage Longliner Palabuhanratu Dan Ukuran Palka Untuk Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Dudine, P., & Jalles, J. T. (2018). How Buoyant Is the Tax System? New Evidence from a Large Heterogeneous Panel. *Journal of International Development*, 30(6), 961–991. <https://doi.org/10.1002/jid.3332>.
- Eka, H., Maruto, P., & Basuki, U. (2019). Analisis Pengaruh Investasi Dan Budge Deficit Terhadap Pertumbuhan Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Economics*, 1, 67.
- FAO. (n.d.). *The Global Record of Fishing Vessels, Refrigerated Transport Vessels and Supply Vessels*.
- FAO. (2020). The State of World Fisheries and Aquaculture. In *Inform*. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>.
- Firdaus, M., Dewitasari, Y., Pramoda, R., Koeshendrajana, S., & Timur, A. (2017). *KERUGIAN SUMBER DAYA IKAN AKIBAT PRAKTIK MARKDOWN KAPAL PENANGKAP IKAN DI INDONESIA/ Fish Resources Losses Due to Mark Down Fishing Vessel Practiced in Indonesia*. 12(2), 133–141.
- Ghazo, A., & Abu-Lila, Z. (2018). Causalities between Components of Public Revenues, and Public Expenditures in Jordan. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 7(2), 59–71. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v7-i2/4211>.
- Gitawati, D. R. (2018). *Analisis Pengaruh Nilai Produksi Budidaya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Sembilan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat*.
- Gujarati, D., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika (5th Ed)*. Penerbit Salemba Empat.
- Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 99–109.
- Iskandar, R., Srinita, & Bintusy Syathi, P. (2021). Tax Reform Effect on Local Tax Buoyancy in Indonesia. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 2(4), 218–224.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). *Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA No 19 Tahun 2022. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022, 3, 1–7*.
- Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 171–181. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i3.212>
- Novita, T., & Duadji, N. (2017). Dampak Ekonomi Politik Kebijakan Peneggelaman Kapal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 8(1).
- Omondi, O. V., Wawire, N. H. W., Manyasa, E. O., & Thuku, G. K. (2014). Effects of Tax Reforms on Buoyancy and Elasticity of the Tax System in Kenya: 1963–2010. *International Journal of Economics and Finance*, 6(10), 97–111. <https://doi.org/10.5539/ijef.v6n10p97>
- Parui, P. (2021). Government expenditure and economic growth: a post-Keynesian analysis. *International Review of Applied Economics*, 35(3–4), 597–625. <https://doi.org/10.1080/02692171.2020.1837744>
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1979). *Approaches To The Analysis of Government Expenditure Growth*. 7(1), 3–23.
- Putra, D. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Tembakau Indonesia Ke Jerman. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 35–45.
- Samosir, A. P., Tenrini, R. H., & Nugroho, A. (2014). Analisis potensi penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan tangkap. *Jurnal Borneo Administrator*, 10(2), 143–166.
- Setyoningrum, D., & Purwanti, E. Y. (2020). Analisis Tax Buoyancy pada Asean-5 Tahun 2002–2016. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(2), 741–750.
- Seydou, S. S. (2020). Elasticity and buoyancy of tax system in Cote d'Ivoire. *Journal of Economics and*

International Finance, 12(3), 142–150. <https://doi.org/10.5897/jeif2020.1070>.

- Supriadi, D., Nurhayat, & Didha Andini Putri. (2019). Kesesuaian Ukuran Kapal Dengan Dokumen Pada Kapal Jala Cumi (Cast Net) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Kejawanan Cirebon. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 10(2), 89–95.
- Wibowo, P., Abimanyu, Y., Syafardi, H., Prabowo, M., & Indrawati, I. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Negara/Lembaga Periode 2012-2017. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 227–245. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.343>.
- Zulkarnain, M., Purwanti, P., & Indrayani, E. (2013). Analysis of Aquaculture Production Value Effect To Gross Domestic Product of Fisheries Sector in. *Jurnal ECSOFiM*, 1(1), 52–68.